

**Pendapat** | Demokratisasi Energi Berita Tempo Plus

Transisi Energi dari Bawah

**Yogi Setya Permana**Peneliti politik tata kelola banjir
dan perubahan iklim di Badan...**Bersama Menjaga Kualitas Jurnalisme**

Kami percaya jurnalisme yang berkualitas lahir dari dialog yang terbuka antara penulis dan pembaca. Masukan Anda membantu kami menjaga akurasi, independensi, dan kualitas setiap karya jurnalistik.



Pemerintah hendak memanfaatkan jutaan hektare hutan rusak untuk lahan bahan baku biodiesel. Mengabaikan prinsip demokratisasi energi.

17 Oktober 2026 | 07.00 WIB

Transisi Energi dari Bawah

Yogi Setya Permana¹

Pemerintah hendak memanfaatkan jutaan hektare hutan rusak untuk lahan bahan baku biodiesel. Mengabaikan prinsip demokratisasi energi.

Ringkasan Berita

- Isi artikel ini untuk merespons pernyataan Hashim Djojohadikusumo soal kemungkinan pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk bahan baku biodiesel.
- Rencana itu seperti melupakan pilihan lain: energi terbarukan yang dikelola langsung oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat.
- Keberhasilan transisi energi juga patut dilihat dari siapa yang memiliki kendali, menikmati hasilnya, dan bisa mengawasi risikonya.

PERNYATAAN Hashim Djojohadikusumo mengenai kemungkinan pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk bahan baku biodiesel B50 hingga B100 kembali memperlihatkan betapa kuatnya kecenderungan membangun energi lewat proyek yang membutuhkan lahan dan modal besar. Tujuannya, yakni mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tentu penting. Namun, di tengah pembicaraan tentang jutaan hektare lahan itu, kita jarang membicarakan pilihan lain, yaitu membangun energi terbarukan yang dikelola masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat. Mengapa warga yang hidup dekat dengan sumber energi tidak sekaligus diberi ruang untuk memproduksi, memiliki, dan menikmati hasilnya?

Di sinilah pentingnya demokratisasi energi dari bawah. Persoalannya tidak berhenti pada pilihan bahan bakar. Kita juga perlu bertanya siapa yang mengambil keputusan, menguasai sumber daya, dan memperoleh manfaat. Tanpa adanya perubahan dalam hal-hal tersebut, energi yang lebih hijau bisa tetap dibangun dengan pola kekuasaan lama. Keputusan tetap terpusat, investasi didominasi pemodal besar, sedangkan warga sekitar proyek hanya punya sedikit ruang untuk ikut menentukan.

Ketika Warga Tidak Ikut Menentukan

Dalam penelitian kami di Papua Selatan, persoalan ini terlihat pada pengembangan perkebunan tebu berskala besar yang dikaitkan dengan produksi bioetanol. Bahan bakarnya memang berbeda

¹ Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional

dari biodiesel yang dibicarakan Hashim. Namun keduanya sama-sama bertumpu pada perluasan pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Bagi masyarakat adat Malind Anim di Merauke, wilayah yang dipetakan sebagai ruang produksi itu bukan tanah kosong. Dari hutan, mereka memperoleh bahan pangan dan obat-obatan, berburu, serta menjaga ikatan dengan leluhur dan sesama marga.

Di sebuah kampung yang kami teliti, lima marga memasang sasi, larangan adat yang membatasi akses ke hutan yang hendak dimasuki perkebunan tebu. Ketika kami kembali pada Juni 2026, perusahaan masih belum dapat memperluas kegiatan ke hutan itu, meski proyek di lokasi lain terus berjalan. Warga tak sekadar menolak sesuatu yang datang dari luar. Melalui sasi, mereka menegaskan bahwa hutan tersebut sudah memiliki aturan dan pihak-pihak yang berwenang mengelolanya. Sayangnya, kewenangan seperti ini seperti ini sering harus diperjuangkan ketika keputusan investasi lebih dulu dibuat di tempat lain.

Di Dieng, Jawa Tengah, kami menjumpai persoalan lain. Pipa dan fasilitas energi panas bumi berdampingan dengan rumah, kebun kentang, dan sumber air warga. Sejumlah warga bercerita bahwa air yang biasa mereka gunakan kini terasa berbeda. Mereka juga khawatir akan dampaknya terhadap pertanian. Penyebab perubahan yang mereka keluhkan masih diperdebatkan, tapi perbedaan pandangan itu menyisakan pertanyaan penting. Sejauh mana pengalaman orang yang sehari-hari hidup dekat fasilitas energi turut diper hitungkan dalam keputusan pembangunan?

Dua pengalaman itu membuat saya melihat keadilan energi secara lebih luas. Kompensasi dan pembagian keuntungan memang penting, tetapi warga juga perlu memiliki ruang untuk menentukan penggunaan tanah, memahami risiko, serta memengaruhi cara proyek dijalankan.

Energi Hijau, Kuasa Lama

Hal ini relevan ketika pembangunan energi menggunakan kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudahan perizinan dan dukungan negara dapat membantu mempercepat investasi. Namun, apa gunanya konsultasi jika keputusan terpenting sudah dibuat sebelum warga didengar? Dalam keadaan seperti itu, warga bisa hadir dalam pertemuan, tetapi belum tentu memiliki kesempatan untuk mengubah rencana.

Proyek berskala besar membutuhkan modal, teknologi, dan akses ke berbagai lembaga. Tidak semua orang memilikinya. Peluang untuk menguasai infrastruktur dan menikmati keuntungannya pun lebih mudah terkumpul pada pelaku yang sudah kuat. Masyarakat sekitar mungkin mendapat pekerjaan atau bantuan sosial, tapi manfaat itu berbeda dari kewenangan menentukan apa yang dibangun di wilayah mereka. Energinya berganti, sementara pola penguasaan sumber daya tetap bertahan.

Demokratisasi Energi dari Bawah

Kita tidak perlu memilih secara mutlak antara proyek besar dan pembangkit kecil. Indonesia membutuhkan sistem energi yang beragam. Salah satu bagian yang patut diperbesar ialah energi terdesentralisasi yang membuka ruang bagi kepemilikan dan pengelolaan komunitas. Pembangkit

surya dan mikrohidro, misalnya, dapat dikembangkan untuk kebutuhan rumah tangga, usaha kecil, atau layanan publik dengan mempertimbangkan kondisi setempat.

Pilihan ini masuk akal juga dari segi ekologi. Aliran sungai, intensitas matahari, dan kebutuhan energi berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Warga setempat punya pengalaman tentang perubahan musim, penggunaan air, dan kebutuhan sehari-hari yang patut masuk dalam perencanaan. Keterlibatan itu tidak menjamin pembangkit kecil bebas masalah. Sengketa akses atau kerusakan lingkungan tetap mungkin terjadi. Namun, jika pengelolaannya terbuka, masyarakat mempunyai peluang lebih besar untuk mengawasi dampak dan memperbaiki keputusan sebelum masalah membesar.

Pembangkit mikrohidro Cinta Mekar di Subang, Jawa Barat, memberi contoh. Pembangkit berkapasitas 120 kilowatt tersebut dikembangkan dengan keterlibatan koperasi masyarakat dalam kepemilikan. Dalam pengelolaannya, sebagian pendapatan dari penjualan listrik pernah dialokasikan untuk kegiatan sosial masyarakat. Yang menarik bukan ukuran pembangkitnya, melainkan cara warga mengambil bagian dalam manfaat ekonomi dari sumber energi di sekitar mereka.

Tentu, model ini menghadapi tantangan. Modal awal, perawatan, dan kemampuan teknis membutuhkan dukungan. Pengelola komunitas juga bisa dikuasai segelintir elite. Surya dan mikrohidro pun tidak menggantikan kebutuhan biodiesel untuk transportasi atau industri. Demokratisasi energi berarti memberi tempat bagi beragam model dan memastikan kekuasaan di dalamnya tidak hanya berpindah dari pusat ke elite lokal.

Di sinilah negara harus hadir. Sebagian pendanaan dan insentif energi terbarukan bisa diarahkan kepada koperasi, badan usaha milik desa, dan lembaga energi komunitas. Mereka membutuhkan pendampingan teknis, pembiayaan perawatan jangka panjang, serta aturan yang memungkinkan listrik digunakan secara lokal atau dijual dengan layak. Warga juga harus terlibat sejak pemilihan lokasi dan teknologi hingga pengawasan serta pembagian manfaat, bukan baru diundang ketika semuanya diputuskan.

Prinsip yang sama berlaku untuk proyek besar yang masih diperlukan. Penilaian risiko harus dapat diperiksa publik, pengetahuan masyarakat didengar sejak awal, dan keberatan warga sungguh dapat memengaruhi lokasi maupun desain proyek. Di wilayah adat, hak atas tanah dan proses persetujuan tanpa paksaan harus dihormati. Konsultasi yang bermakna boleh jadi memperlambat sebuah keputusan, tetapi dapat mencegah konflik yang jauh lebih mahal bagi semua pihak.

Kita tentu perlu menghitung tambahan megawatt, campuran biofuel, dan nilai investasi. Namun, keberhasilan transisi energi juga patut dilihat dari siapa yang memiliki kendali, menikmati hasilnya, dan bisa mengawasi risikonya. Indonesia membutuhkan energi yang lebih bersih. Yang tak kalah mendesak ialah memastikan warga punya suara dan bagian yang nyata dalam membangunnya.